



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 188.342/KEP.17-DPRD/2021

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan DPRD bersama Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD ;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dan hasil Rapat Paripurna tanggal 29 November 2021 Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang 2

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Majalengka Nomor : 188.34/1707/Hukum tanggal 4 Nopember 2021 Perihal Penyampaian Usulan Usulan Propemperda Tahun 2022.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Majalengka Nomor 188.342/1566.1/DPRD tanggal 18 November 2021 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 Inisiatif DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah untuk Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat Rancangan Peraturan Daerah baik yang sudah maupun yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang perlu segera dibahas sesuai dengan urgensinya berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah, Pembahasannya dapat diprioritaskan.

KETIGA 3

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 29 November 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**
Ketua,



EDY ANAS DJUNAEDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
 NOMOR : 188.342/KEP. 17.DPRD/2021
 TANGGAL : 29 November 2021
 TENTANG : **PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022**

**DAFTAR USULAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2022**

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTAN SIPEMR AKARSA	TARGET PENYA M- PAIAN
			BARU	UBAH			
1.	Retribusi Pariwisata	Mengatur mengenai : 1. Jenis retribusi. 2. Objek retribusi; 3. Subjek retribusi dan dispensasi 4. Prinsip tarif retribusi; 5. Struktur dan besaran tarif; 6. Tata cara perhitungan; 7. Masa dan wilayah pemungutan tarif	√	-	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Triwulan III
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021	Mengatur mengenai laporan pelaksanaan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.	√	-	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Triwulan II

NO	TENTANG	MATERIPOKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTAN SIPEMR AKARSA	TARGET PENYA M- PAIAN
			BARU	UBAH			
3.	Perubahan APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022	Mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2022	√	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Triwulan III
4.	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka	Mengatur mengenai : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak restoran; 2. Pajak penerangan jalan; 3. Pajak hiburan; 4. BPHTB. 	-	√	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 	Badan Pendapatan Daerah	Triwulan III

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTAN SIPEMR AKARSA	TARGET PENYA M- PAIAN
			BARU	UBAH			
5.	Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka	Mengatur mengenai pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur	Bagian Organisasi	Triwulan II
6.	APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023	Mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka untuk Tahun Anggaran 2023	√	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Triwulan IV

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTAN SIPEMR AKARSA	TARGET PENYA M- PAIAN
			BARU	UBAH			
7.	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Perumahan dan Permukiman dan Utilitas	Mengatur mengenai Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka	√	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Triwulan IV
8.	Raperda Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan Dan Keolahragaan	Mengatur tentang : 1. Kurangnya minat olahraga pada anak-anak usia dini di sekolah-sekolah; 2. Terbatasnya sarana prasarana olahraga di masyarakat; 3. koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan <i>stakeholder</i> lainnya,	√		1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655); 2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);	Dinas Pemuda dan Olahraga	Triwulan III Inisiatif DPRD
9	Raperda Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Mengatur tentang : 1. Susunan Organisasi Tata Kerja 2. Penanggulangan Bahaya Kebakaran 3. Kantor Unit Pelayanan Teknis	√		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Pemadam Kebakaran Di Daerah 3. Permendagri nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	SatPol PP	Triwulan III Inisiatif DPRD

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTAN SIPEMR AKARSA	TARGET PENYA M- PAIAN
			BARU	UBAH			
10.	Pengelolaan Zakat	Mengatur tentang : 1. Pengelolaan Zakat 2. Kelembagaan BAZNAS	√		<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Kimisi negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional; Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830); 11 	KEMENAG	Triwulan III Inisiatif DPRD
11.	Pengelolaan Sampah	Mengatur Tentang : 1. Pengelolaan Sampah 2. Penanganan sampah dan Pengumpulan Sampah 3. Sarana dan Prasarana Mobilitas Agkutan sampah.	√		<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah 	Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan III Inisiatif DPRD

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ INSTAN SIPEMR AKARSA	TARGET PENYAM- PAIAN
			BARU	UBAH			
					diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri E).		
12	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Mengatur tentang : 1. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 2. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; 3. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 4. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;	√		1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Triwulan IV Inisiatif DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

Ketua,



EDY ANAS DJUNAEDI